

**PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN MELALUI SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

**AYU ASMARA TITO
07011181520014**

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN MELALUI SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**AYU ASMARA TITO
07011181520014**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing I

**Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001**



Pembimbing II

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 196211251989121001**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Badan Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Pada Tanggal 10 Desember 2020.

Indralaya, 10 Desember 2020

Ketua

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001



Anggota

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.Si
NIP. 198108272009121002



2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

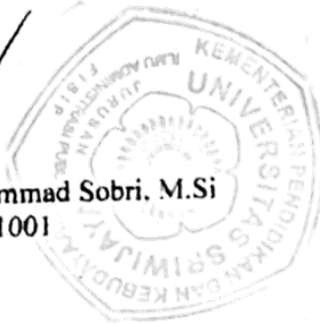


3. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.

(QS. Al- Ghaafir ayat 60)

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia

(QS. Yasin ayat 82)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Sutoto Diharto dan Ibu Yulistina
2. Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI
3. Almamater Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Badan Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran dan bantuan moril maupun materil. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Sutoto Diharto dan ibu Yulistina yang selalu mendoakanku, mendidikku, mendukung moril maupun materil, dan memberiku semangat dalam suka maupun duka serta kasih sayang tak terhingga yang telah ibu dan bapak berikan kepadaku.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku pembimbing akademik.
7. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, saran, kritikan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan sumbangan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, saran, kritikan yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu segala bentuk keperluan dan ilmu yang telah diberikan di bangku kuliah.
10. Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dalam mengurus surat-surat kelengkapan selama menjalani kuliah maupun saat proses penyusunan skripsi.
11. Seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang telah

12. meluangkan waktunya untuk membantu proses wawancara dan dokumentasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ayu Asmara Tito, terima kasih sudah kuat sabar menghadapi semua masalah dan ujian yang kau hadapi. Semoga semakin bertumbuh dan berkembang karna kau harus tau rasanya menangis bahagia.
14. Anggi Setyawan, terima kasih telah menunggu dan mendukung penulis dari jauh dalam menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman Luwing Biawak, terima kasih sudah menjadi keluarga ditanah rantau.
16. Meti Aprilia, temanku terima kasih atas kebaikan dan kepedulianmu selama ini dari awal kuliah hingga akhir. Semangat ya kita pasti bisa melewati semuanya.
17. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2015, semoga kelak kita dapat bertemu kembali dengan kesuksesan masing-masing.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan Skripsi ini.

Indralaya, Januari 2020

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak penghasilan badan melalui surat teguran dan surat paksa pada periode 2016-2018. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan jumlah tunggakan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang meningkat tidak sebanding dengan jumlah pencairan penerimaan pajak yang menurun. Penelitian ini menggunakan teori manajemen dari George R. Terry yang mempunyai empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada aspek perencanaan menunjukkan pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku secara nasional berdasarkan Undang-Undang. Aspek pengorganisasian sudah terorganisir dengan baik yaitu adanya penunjukkan jurusita dan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, meskipun jurusita pajak yang ada kurang memenuhi standar prestasi. Aspek pelaksanaan telah dilaksanakan dengan baik sesuai SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. Aspek pengawasan telah dilakukan dengan pengawasan secara internal atau melekat terdapat kendala pada wajib pajak yang kurang kooperatif dalam membayar pajak, wajib pajak yang hilang kontak dan kurangnya jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan. Dengan demikian, pihak KPP perlu melakukan usaha seperti sosialisasi pentingnya pajak pada masyarakat, Penyelenggaraan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian, serta aparat-aparat terkait untuk mengatasi Wajib Pajak yang hilang kontak dan penambahan pegawai dengan harapan pelaksanaan penagihan pajak dapat berjalan efektif.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pajak, Penagihan, Surat, Teguran, Paksa

Pembimbing I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 19661230 1992032001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



ABSTRACT

This study aims to identify and describe the activities of implementing corporate income tax collection through warning letters and coercive letters in the 2016-2018 period. This research is motivated by the increase in the amount of corporate income tax arrears at the Palembang Ilir Timur Pratama Tax Service Office which is not proportional to the decreased amount of tax revenue disbursement. This study uses management theory from George R. Terry which has four functions, namely planning, organizing, implementing and monitoring. This type of research uses qualitative descriptive research. Data collection techniques used include interviews and documentation. The results of research on the implementation of tax collection with warning letters and coercive letters on the planning aspect show that the implementation is in accordance with the national regulations and procedures based on the law. The organizational aspect is well-organized, namely the appointment of bailiffs and a clear division of tasks and authorities, even though the tax bailiffs do not meet the standard of achievement. The implementation aspects have been implemented properly in accordance with the SOP and applicable laws and regulations. The aspect of supervision has been carried out by internal supervision or inherent there are obstacles to taxpayers who are less cooperative in paying taxes, taxpayers who have lost contact and lack of tax bailiffs in the implementation of billing. Thus, KPP needs to carry out efforts such as socializing the importance of taxes to the community, implementing cooperation with the Regional Government, Police, and related officials to overcome taxpayers who have lost contact and additional employees in the hope that the implementation of tax collection can be effective.

Keywords: *Actuating, Tax, Billing, Letter, Reprimand, Forced*

Supervisor I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032001

Supervisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, January 2021

*Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University*



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pajak	7
2. Penagihan Pajak	10
3. Fungsi Manejemen Menurut Terry	16
B. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Definisi Konsep	23

C. Fokus Penelitian	24
D. Data dan Sumber Data	25
E. Informan Penelitian	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data	28
H. Sistematika Penulisan	29
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi	30
1. Sejarah KPP Palembang Ilir Timur	30
2. Profil KPP Palembang Ilir Timur.....	31
3. Visi, Misi, Motto, KPP Palembang Ilir Timur.....	32
4. Tugas dan Fungsi KPP Palembang Ilir Timur	32
5. Struktur Organisasi KPP Palembang Ilir Timur	33
B. Hasil dan Pembahasan	37
1. Analisis Perencanaan Pada Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Badan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kota Palembang.....	38
2. Analisis Pengorganisasi Pada Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Badan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kota Palembang.....	41
3. Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Badan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kota Palembang.....	51
4. Analisis Pengawasan Pada Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Badan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Kota Palembang.....	72
BAB V PENUTUP	87
1. Kesimpulan	87
2. Saran	89

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tunggakan dan Realisasi Penerimaan	3
Tabel 2. Penagihan Pajak Penghasilan Badan dengan Surat Teguran.....	4
Tabel 3. Penagihan Pajak Penghasilan Badan dengan Surat Paksa.....	4
Tabel 4. Fokus Penelitian	25
Tabel 5. Jam Kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur	31
Tabel 6. Daftar Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan	36
Tabel 7. Daftar Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan	36
Tabel 8. Daftar Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	36
Tabel 9. Jurusita Pajak di KPP Palembang Ilir Timur	44
Tabel 10. Daftar Pegawai di Seksi Penagihan Pajak KPP Palembang Ilir Timur	48
Tabel 11. Jumlah Surat Paksa dan Jumlah Jurusita Ideal	50
Tabel 12. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	53
Tabel 13. Penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	71
Tabel 14. Matrik Penelitian	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	22
Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	34
Gambar 3. Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan	52
Gambar 4. Bagan Arus Penerbitan Surat Teguran	59
Gambar 5. Bagan Arus Penerbitan Surat Paksa	65

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BUT	: Bentuk Usaha Tetap
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
CV	: Perusahaan Komanditer
Fa	: Perusahaan Firma
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PT	: Perusahaan Terbatas
PTKP	: Pengusaha Tidak Kena Pajak
SKPKB	: Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SP	: Surat Paksa
SPMP	: Surat Pajak Melaksanakan Penyitaan
ST	: Surat Teguran
STP	: Surat Tagihan Pajak
WP	: Wajib Pajak

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Pedoman Observasi

Lampiran 3 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus

Lampiran 4 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang diambil secara paksa lalu diberikan kepada negara dimana menurut peraturan perpajakan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi negara perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, semakin bersungguh-sungguh dalam melakukan program semakin optimal penerimaan sektor pajak.

Pada 1 Januari 1984 pemerintah membuat suatu pembaharuan sistem perpajakan yang telah diperbarui dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 tentang perubahan sistem perpajakan yang disebut *self assessment*. Prinsip *self assessment* menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 12 ayat (1) dimana setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan secara mandiri utang pajak terutang menurut ketentuan perpajakan.

Kepatuhan diperlukan pada peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak akan meningkat. Kepatuhan sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjamin tersedianya dana yang ada bagi negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran negara.

KPP Pratama Palembang Ilir Timur melakukan proses dalam kegiatan penagihan pajak terhadap wajib pajak melalui surat teguran dan surat paksa untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Penagihan dilakukan karena adanya tunggakan pajak yang terutang. Jumlah tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebagai berikut:

Tabel 1. Tunggakan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	Tunggakan Pajak	Pencairan Tunggakan
2016	124.759.354.000	1.301.990.000
2017	587.981.276.230	2.667.300.998
2018	897.879.679.778	15.364.255.925

Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Penagihan dengan surat teguran yang sudah dilaksanakan sering kali mendapati wajib pajak tidak melunasi pajaknya walaupun sudah diberikan tindakan penagihan pasif berupa dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) , sehingga jika dalam waktu 21 hari jatuh tempo setelah penerbitan surat teguran namun penanggung pajak belum melunasi hutang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dikeluarkan oleh KPP dan harus dibayar dalam waktu 2X24 jam. ST maupun SP yang terbit terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari tahun ketahun baik surat teguran maupun surat paksa yang diterbitkan tidak mencapai target yang diharapkan bahkan persentase yang terjadi kurang dari 50%. Realisasi penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur:

Tabel 2. Penagihan Pajak Penghasilan Badan melalui Surat Teguran

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran		Persentase (%)
	Lembar	Rp	Lembar	Rp	
2016	5806	74.285.806.660	1622	19.581.461.068	27.93%
2017	14984	73.779.688.836	1518	15.267.675.032	10.13%
2018	14384	35.698.304.418	5746	11.365.352.433	39.94%

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Menurut tabel 2 diatas penerbitan ST dari tahun 2016 hingga tahun 2018 baik lembar maupun nominalnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dan 2018 namun tidak diimbangi dengan jumlah pencairan tunggakan yang diterima. Data realisasi penagihan pajak penghasilan badan dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Penagihan Pajak Penghasilan Badan dengan Surat Paksa

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa		Persentase (%)
	Lembar	Rp	Lembar	Rp	
2016	1487	5.356.269.618	896	10.301.559.790	60.25%
2017	2534	8.329.043.553	784	11.356.041.510	30.93%
2018	2204	8.311.030.443	933	4.595.057.806	42.33%

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2018

Pada tabel 3 diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah penerbitan lembar surat paksa di KPP di tahun 2016 sampai tahun 2018 diikuti dengan penurunan nilai

pencairan tunggakan pajak. Penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2018 malah mengalami penurunan pencairan.

Penerimaan yang diperoleh dari Surat Teguran dan Surat Paksa tidak bisa menutup seluruh nilai Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan ST dan SP di KPP Pratama Palembang Ilir Timur belum berjalan maksimal. Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur juga menjadi salah satu faktor penting dalam proses penagihan tunggakan pajak yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut.

Masalah ini bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa sangat diperlukan untuk membangun kepatuhan pada wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan dan mengurangi tunggakan wajib pajak. Berdasarkan data dan tabel diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Badan Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang diteliti Adalah:

Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak penghasilan badan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut:

Untuk menganalisis proses pelaksanaan penagihan pajak dan mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan penagihan pajak penghasilan badan melalui ST dan SP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dan konsentrasi Manajemen Publik dalam hal kajian mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penagihan dan memberikan saran dalam mengambil langkah yang tepat dalam rangka mengatasi hambatan kegiatan pelaksanaan penagihan dengan ST dan SP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasibuan, Malayu S.P. 2015. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV.Mandar Maju

Terry, G.R. 2012. *Asas-Asas Manajemen (alih bahasa DR. Winardi, S.E)*. Jakarta PT. Bumi Aksara

Terry, G.R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen (alih bahasa J. Smith D.F.M)*. Jakarta PT. Bumi Aksara

Tim Penyusunan Revisi Pedoman Penulisan Skripsi. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Palembang : Fisip Unsri

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Zuraida, Ida. 2011. *Penagihan Pajak: Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Undang-Undang dan Peraturan- Peraturan

Keputusan Menteri Keuangan No.4 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengangkatan Jurusita Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2008 Tentang Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

SOP Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor KPP40-0010 tentang tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Teguran.

SOP Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor KPP40-0011 tentang tata cara penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa.

Referensi Internet

Rosyidi, Fahmi. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil Djp Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II*. Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 3 No. 1 hal 47- 58

Samrotun, Yuli. 2009. *Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta*. Paradigma, Vol. 6 No. 2

Sartika, Ita. 2012. *Pelaksanaan Penagihan Pajak Restoran di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011*. Indralaya: Fisip Unsri